



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FREDDY HARRIS**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**
3. NHK : **144876**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 12.859.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/150 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
2. Tanah Seluas 256 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp.
256.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp.
400.000.000
4. Tanah Seluas 301 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp.
301.000.000
5. Tanah Seluas 180 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah Seluas 200000 m2 di KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp.
700.000.000
7. Tanah Seluas 115 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL
SENDIRI Rp. 287.500.000
8. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
9. Tanah Seluas 200 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000.000
10. Tanah Seluas 500 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL
SENDIRI Rp. 8.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. ----****C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 458.340.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.814.269.983
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.132.109.983
III. HUTANG	Rp.	16.200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-1.067.890.017

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **17 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.